

**ODAMPAK KETIADAAN PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM
PENJATUHAN SANKSI PIDANA MELEBIHI PIDANA
MAKSIMUM DALAM KUHP
(Studi Kasus Nomor 44/Pid.B/2018/PN Gst).**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Akademik
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia**

Oleh :

ELFIANA HULU

NIM. 2002190001



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
TAHUN 2022**

JAKARTA



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elfiana Hulu
NIM : 2002190001
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Strata Dua

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Dampak Ketiadaan Pedoman Pemidanaan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Melebihi Pidana Maksimum Dalam KUHP (Studi Kasus Nomor 44/Pid.B/2018/PN Gst)" Adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar magister di universitas lain, kecuali pada bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan diatas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 25 Mei 2022

Yang membuat Pernyataan,



(Elfiana Hulu)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

JUDUL:

**DAMPAK KETIADAAN PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM
PENJATUHAN SANKSI PIDANA MELEBIHI PIDANA MAKSIMUM
DALAM KUHP
(Studi Kasus Nomor 44/Pid.B/2018/PN Gst).**

Nama : Elfiana Hulu
NIM : 2002190001
Program : Hukum Program Magister Pascasarjana
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna mencapai gelar Sarjana Strata Dua Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 25 Mei 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Mompang L. Panggabean S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Dr Djernih Sitanggang, BC., IP., S.H., M.H.

Program Studi Magister Hukum

Ketua

Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H

Program Pascasarjana

Direktur

Dr. Bintang R. Simbolon, M. Si



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 25 Mei 2022 telah diselenggarakan sidang tugas akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh Sarjana Strata Dua Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Kristen Indonesia.

Nama : Elfiana Hulu
NIM : 2002190001
Program : Hukum Program Magister Pascasarjana
Peminatan : Hukum Pidana

Termasuk Ujian Tugas Akhir Yang Berjudul “Dampak Ketiadaan Pedoman Pemidanaan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Melebihi Pidana Maksimum Dalam KUHP (Studi Kasus Nomor 44/Pid.B/2018/PN Gst).” Oleh Tim Penguji yang Terdiri Dari:

Prof. Dr. Mompang L. Pangabean, S.H., M.Hum.

Ketua Sidang

Dr. Djernih Sitanggang, BC., IP., S.H., M.H.

Penguji

Dr. Hendi J. Pandiangan, S.H., M.H.

Penguji

Jakarta 25 Mei 2022





UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elfiana Hulu
NIM : 2002190001
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Strata Dua
Judul : Dampak Ketiadaan Pedoman Pemidanaan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Melebihi Pidana Maksimum Dalam KUHP (Studi Kasus Nomor 44/Pid.B/2018/PN Gst).

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya tulis saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik diperguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut merupakan bukan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif, Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta tanggal 25 Mei 2022

Yang menyatakan

Elfiana Hulu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunia-Nya yang memberikan kemampuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Dampak Ketiadaan Pedoman Pidanaan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Melebihi Pidana Maksimum Dalam KUHP (Studi Kasus Nomor 44/Pid.B/2018/PN Gst).”**

Proses penyusunan Tesis ini tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa dukungan moral maupun materiil dari berbagai pihak yang membantu untuk menyelesaikan penelitian ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memelihara dan menyertai penulis dalam perkuliahan terlebih-lebih dalam penyusunan Tesis ini.
2. Bapak Dr. Daniswara K. Harjono. S.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
3. Ibu Dr. Bintang R. Simbolon. M. Si selaku Direktur Program Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Gindo L.Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran serta masukan-masukan yang membangun bertujuan untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini.

6. Bapak Dr. Djernih Sitanggang, Bc.IP., S.H. M.H., selaku Pembimbing II yang telah yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran serta masukan-masukan yang membangun bertujuan untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Program Magister Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia atas ilmu yang bermanfaat serta waktu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Program Studi Hukum Program Magister Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia.
8. Orang tua tercinta, Ayahanda Bowozatulo Hulu dan ibunda Natiria Giawa (+) yang selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk menjadi yang terbaik.
9. Suamiku tercinta Romanus Restu Jaya Laia A.M.K.G yang selalu mendoakan dan mendukung penulis agar tidak menyerah dan tetap percaya atas segala apa yang penulis miliki dalam penyusunan Tesis ini.
10. Teman-teman angkatan 2020 Program Studi Hukum UKI .

Pada penyusunan tesis, penulis menyadari bahwa terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat terbuka akan saran dan kritik yang membangun.

Jakarta, 25 Mei 2022

Penulis

(Elfiana Hulu S. H.)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I – PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1. Maksud Penelitian.....	6
2. Tujuan Teoritis	6
3. Tujuan Praktis	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual	7
1. Kerangka Teoritis	7
2. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Metode Pendekatan Penelitian	14
3. Teknik dan alat Pengumpulan Data	15
4. Analisis Data	16
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II - TINJAUAN PUSTAKA	18
BAB III - PEMBAHASAN	41
BAB IV – PEMBAHASAN	52
BAB V – PENUTUP	85
DAFTAR PUSTAKA	87



ABSTRAK

Nama : ELFIANA HULU.
NIM : 2002190001
Program Studi/Kekhususan : Hukum / Hukum Pidana
Judul Tesis : Dampak Ketiadaan Pedoman Pemidanaan Dalam Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Melebihi Pidana Maksimum Dalam KUHP (Studi Kasus Nomor 44/Pid.B/2018/PN Gst).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 299/Pid.B/2013/PN.Gst). penulis mengemukakan kejanggalan didalam putusan hakim tersebut karena putusan hakim melebihi sanksi pidana yang telah diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP yaitu sanksi pidana maksimal 5 tahun pidana penjara. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Dampak ketiadaan pedoman pemidanaan dalam penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang melebihi pidana maksimum KUHP,(Studi Kasus Nomor 44/Pid.B/2018/PN Gst). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini menitikberatkan pada studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan, dan metode pendekatan kasus. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang bersumber dari hasil pengkajian pustaka melalui pengumpulan bahan hukum. Penulis menganalisis data secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Serta penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Tentang Pedoman Pemidanaan Dalam Hukum Positif di Indonesia Belum diatur secara ekplisit dan tegas dalam KUHP sebagai aspiratif dan kodifikasi, sehingga dapat menimbulkan dampak ketidakadilan seperti disparitas pemidanaan dan adanya sanksi pidana yang melebihi ketentuan maksimum. Dalam Perspektif *Ius Constituendum* Pedoman Pemidanaan selayaknya di atur Dalam KUHP karna Gagasan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam RUU KUHP menunjukkan adanya pemikiran baru dalam perkembangan teori pemidanaan yang mempunyai ciri lebih komprehensif dan bernuansa kearifan lokal tentang tujuan pidana. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Gst, dapat disimpulkan bahwa, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun. Putusan ini jelas melanggar ketentuan hukuman maksimum (*special straf maxima*) yang telah diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa pelaku dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun”.

Kata Kunci: *Pedoman Pemidanaan; Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Penganiayaan;*

ABSTRACT

Student Name : Elfiana Hulu
Student Parent Number : 2002190001
Specificity Program : Criminal Law
Title : *The Impact Of Absance Criminal Guidelines in Imposing Criminal Acts on Perpetrators of Criminal Acts of Persecution that Exceed the Maximum Penalty of the Criminal Code, (Case Study Number 44/Pid.B/2018/PN Gst)*

In the decision of the Gunungsitoli District Court Number 299/Pid.B/2013/PN.Gst). However, after being examined by the researcher, the researcher stated that there were irregularities in the judge's decision because the judge's decision exceeded the criminal sanctions stipulated in Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code, namely a maximum criminal sanction of 5 years in prison. Based on this description, researcher interested in conducting the research with title The Impact Of Absance Criminal Guidelines in Imposing Criminal Acts on Perpetrators of Criminal Acts of Persecution that Exceed the Maximum Penalty of the Criminal Code, (Case Study Number 44/Pid.B/2018/PN Gst). The type of research used in this research is normative legal research. This normative legal research focuses on literature studies. This study uses a research approach to legislation, and a case approach method. This research using secondary data, data sourced from the results of a literature review through the collection of legal materials. The researcher analyzed the data qualitatively with a descriptive approach and drawing conclusions using the deductive method.

Based on the results of the research findings and discussion, it can be concluded that the Regulation on Guidelines for Criminalization in Positive Law in Indonesia has not been explicitly and firmly regulated in the Criminal Code as aspirational and codified, so that it can cause unfair impacts such as disparity in punishment and the existence of criminal sanctions that exceed the maximum provisions. In the perspective of the Ius Constituendum, the Guidelines for Criminalization should be regulated in the Criminal Code because the idea of the purpose of punishment as formulated in the Draft Criminal Code indicates that there is a new thought in the development of the theory of punishment which has more comprehensive characteristics and nuances of local wisdom regarding the purpose of crime. The judge's consideration in imposing a crime against the defendant in Decision Number 44/Pid.B/2018/PN.Gst, it can be concluded that the judge sentenced him to imprisonment for 6 years. This decision clearly violates the provisions of the maximum sentence (special straf maxima) which has been regulated in Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code which states that "if the act of torture causes the person to die, he is sentenced to a maximum imprisonment of 5 years".

Keywords: Criminal Guidelines; Judge's consideration; Crime of Persecution: